



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2008-2009
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BNP2TKI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 29 Januari 2009
Pukul	: 09.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membicarakan hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas BNP2TKI; 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Hj. Asiah Salekan, BA/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: orang anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI, ijin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dibuka pukul 09.50 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

Paparan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (seperti diuraikan dalam buku)

III. USUL/SARAN ANGGOTA

1. Diusulkan agar dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Permenakertrans Nomor 22/MEN/XII/2008 agar permasalahan segera diakhiri.
2. Segera membuat terminal kedatangan Selapajang di Bandara Soekarno Hatta agar terasa nyaman untuk para TKI, sehingga TKI tidak akan takut apabila pulang ke Tanah

air. BNP2TKI agar membentuk tim pemantau untuk melakukan pengawasan di kantong-kantong TKI.

3. Perlu dikaji ulang berkenaan dengan biaya kepulangan TKI melalui angkutan bus yang diselenggarakan oleh BNP2TKI yang dinilai terlalu mahal dibanding angkutan umum.
4. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap TKI, apabila ternyata TKI bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya.
5. Perlu pembagian tugas yang jelas antara BNP2TKI dan Depnakertrans, agar tidak membingungkan TKI dan juga tidak menyebabkan terjadinya duplikasi dalam penggunaan anggarannya.
6. Ada kesan TKI merasa aman berada di negara lain dibanding berada di dalam negeri. BNP2TKI seharusnya dapat mengupayakan rasa aman kepada para TKI yang akan kembali ke daerahnya masing-masing.
7. Komisi IX DPR RI prihatin terhadap konflik yang terjadi mengenai terbitnya Permenakertrans Nomor 22/MEN/XII/2008, dan konflik ini harus segera diakhiri. Adapun yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan adalah Pemerintah/Presiden.
8. Disarankan agar BNP2TKI membuat telaahan yang bijak dan saran konstruktif menyangkut Permenakertrans Nomor 22/MEN/XII/2008.
9. Kurang berfungsinya BP3TKI di daerah antara lain disebabkan karena masalah eselonisasi, sehubungan dengan hal itu BNP2TKI agar meningkatkan eselonisasi pejabatnya di daerah.
10. Diusulkan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2009 tidak perlu rapat gabungan antara Menakertrans dan BNP2TKI, namun keputusannya menunggu hasil Rapat Kerja hari Senin tanggal 2 Februari 2009 dengan Menakertrans.

IV. KESIMPULAN

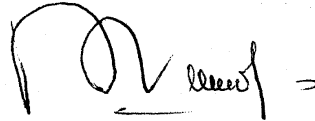
Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI menghargai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penempatan dan perlindungan TKI seraya mendorong BNP2TKI memelihara dan meningkatkan kemajuan yang dicapai dan segera melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang masih ada.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepulangan TKI di GPK Sela Pajang dan Pos pelayanan TKI Nunukan terutama yang terkait dengan praktek pemerasan kepada TKI.
3. Komisi IX DPR mendorong BNP2TKI untuk terus berupaya meningkatkan pengiriman TKI sektor formal dan mengintensifkan upaya penanganan TKI sektor formal yang mengalami PHK akibat dampak krisis ekonomi global agar tetap dapat bekerja di luar negeri.
4. Komisi IX DPR RI mendukung upaya BNP2TKI mengambil inisiatif mendorong pemerintah agar segera memulai proses pembentukan 6 Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UU 39 Tahun 2009.

5. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk terus melakukan upaya-upaya yang bisa mewujudkan pelayanan TKI sebagai industri jasa yang sehat dan mampu berkompetisi dengan negara lain.
6. Komisi IX DPR RI sepakat akan menindaklanjuti pengambilan sikap terhadap Permenakertrans Nomor 22/MEN/XII/2008 dalam Rapat Gabungan antara Komisi IX DPR-RI dengan Depnakertrans RI dan BNP2TKI pada tanggal 4 Februari 2009 agar diperoleh kepastian penegakan peraturan perundang-undangan bidang TKI.

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB

Jakarta, 29 Januari 2009
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Hj. ASIAH SALEKAN, BA